

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA: PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN POLITIK

Yulia Afrilliana¹, Ahmad Arrifai², Kasful Anwar³, Sya'roni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

yuliaafrilliana43@gmail.com

ABSTRACT; *This article discusses Islamic educational institutions in the archipelago before Dutch colonialism: the influence of social and political factors. Islamic educational institutions in the archipelago before Dutch colonialism emerged as a result of a complex combination of social, political and cultural needs. Institutions such as surau, meunasah, dayah, and Islamic boarding schools are centers of education and dissemination of Islamic teachings, which also function as places to gather and learn religious knowledge. Political factors also influenced this development, as Muslim rulers saw Islamic education as a way to consolidate power and create political stability.*

Keywords: *Educational Institutions, Islamic Educational Institutions In The Archipelago, Islam Nusantara.*

ABSTRAK; Artikel ini membahas tentang lembaga pendidikan islam di nusantara sebelum penjajahan belanda: pengaruh faktor sosial dan politik , Lembaga pendidikan Islam di Nusantara sebelum penjajahan Belanda muncul sebagai hasil dari perpaduan kebutuhan sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Lembaga seperti surau, meunasah, dayah, dan pesantren menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam, yang juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan belajar ilmu agama. Faktor politik turut memengaruhi perkembangan ini, karena para penguasa Muslim melihat pendidikan Islam sebagai cara untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menciptakan stabilitas politik.

Kata Kunci: Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara, Islam Nusantara.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Nusantara telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarah, sejalan dengan masuknya agama Islam ke wilayah ini. Islam mulai merambah Nusantara sejak abad ke-7 M melalui aktivitas perdagangan yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara (Hafizd 2021). Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India

memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke daerah-daerah pesisir di Nusantara, seperti Aceh, Malaka, dan Banten melalui jalur perdagangan (Nurlisma 2023). Masyarakat setempat mulai berkenalan dengan ajaran Islam, yang pada awalnya diperkenalkan melalui interaksi sosial dan ekonomi. Selain berdagang, para pedagang Muslim juga menyebarkan nilai-nilai Islam dan membentuk komunitas Muslim yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan Islam di Nusantara (Susmihara 2017). Proses ini berlanjut dan mencapai titik penting ketika kerajaan-kerajaan lokal mulai menerima dan mendukung Islam sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Seiring dengan semakin kuatnya kehadiran Islam di Nusantara, kebutuhan akan pendidikan Islam meningkat. Komunitas-komunitas Muslim yang berkembang mulai mencari cara untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya (Tabrani, A. 2019). Untuk memenuhi kebutuhan ini, berbagai bentuk pengajaran dan pembelajaran mulai muncul di masyarakat. Kegiatan belajar agama Islam ini biasanya berfokus pada pemahaman Al-Qur'an, hadis, fikih, serta aspek-aspek keagamaan lainnya. Aktivitas pendidikan ini seringkali dilakukan di tempat-tempat yang juga berfungsi sebagai pusat ibadah.

Perkembangan pendidikan Islam di Nusantara juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya (Surawardi 2021). Banyak masyarakat Nusantara memiliki tradisi dan kepercayaan lokal yang kuat, sehingga para pendidik Islam seringkali harus menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan konteks lokal. Mereka menggunakan pendekatan yang inklusif, mengintegrasikan elemen-elemen budaya setempat untuk membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterima. Pendekatan ini memungkinkan Islam menyebar tanpa menimbulkan konflik besar dengan kepercayaan lokal.

Dari segi politik, dukungan dari kerajaan-kerajaan lokal memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Beberapa kerajaan di Nusantara mengadopsi Islam sebagai agama resmi, memberikan legitimasi dan dukungan bagi kegiatan pendidikan Islam (Safei 2015). Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan yang berfokus pada studi Islam. Dukungan politik ini juga membantu memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat perdagangan dan pemerintahan.

Selain dukungan politik, aktivitas perdagangan juga berperan dalam penyebaran Islam dan pengembangan pendidikan Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim membawa serta pengetahuan dan informasi dari berbagai wilayah lain, membuka jalur pertukaran intelektual yang membantu memperkaya pendidikan Islam di Nusantara. Dengan demikian, pendidikan Islam di Nusantara berkembang dalam konteks interaksi perdagangan, dukungan politik, dan adaptasi budaya. Pendidikan Islam di Nusantara telah tumbuh dan berkembang melalui proses yang panjang dan kompleks. Faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi semuanya memainkan peran penting dalam membentuk lanskap pendidikan Islam sebelum dan selama periode penjajahan Belanda. Pendidikan Islam menjadi elemen penting dalam membangun identitas keagamaan dan sosial masyarakat Nusantara, menciptakan warisan yang terus berdampak hingga hari ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber Pustaka, berupa buku, jurnal, prosiding seminar yang relevan. Selanjutnya, peneliti menganalisis data-data kepustakaan yang berkaitan sesuai dengan focus penelitian yakni mengenai lembaga pendidikan islam di nusantara sebelum penjajahan belanda: pengaruh faktor sosial dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara Sebelum Penjajahan Belanda

Pendidikan Islam di Nusantara bermula sejak kedatangannya ke Nusantara, pendidikan Islam menjadi salah satu sarana yang menjadi penyebaran Islam melalui aspek pendidikan. Sejarah masa awal pendidikan Islam di Nusantara berawal dari sejarah kerajaan Samudera Pasai, yang diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Lembaga pendidikan tradisional di Nusantara yang telah dikenal dalam ranah pendidikan Islam pada awal Islam berupa, surau, meunasah, dan pesantren (Muslim 2021).

1. Surau

Surau adalah lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam proses Islamisasi di Minangkabau, mirip dengan peran pesantren di pulau Jawa. Surau telah ada sejak lama, bahkan sebelum Islam masuk ke wilayah Minangkabau, dengan fungsi awalnya sebagai

tempat pemujaan nenek moyang yang biasanya berada di bukit-bukit. Azyumardi Azra, mengutip RA. Karn, menyebutkan bahwa istilah 'surau' sudah banyak digunakan di Asia Tenggara pada masa itu, terutama di daerah Minangkabau, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan Batak. Istilah ini juga ditemukan di Malaysia dan wilayah Pattani di Thailand Selatan. Kata "surau" berasal dari bahasa Melayu yang berarti "tempat" atau lokasi untuk melaksanakan ibadah.

Setelah Islam masuk ke Minangkabau, surau berubah menjadi bangunan yang digunakan oleh komunitas Muslim. Surau kemudian berfungsi sebagai tempat berkumpul, tidur bagi anak muda dan laki-laki tua, terutama duda. Bentuk bangunan serupa dengan surau juga ditemukan di daerah lain, seperti Meunasah di Aceh, Uma di Mentawai, Lobo di Toraja Timur, dan Langgar di Jawa.

Berdasarkan ukurannya, surau dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, surau kecil yang dapat menampung sekitar 20 orang; kedua, surau sedang yang dapat menampung sekitar 80 orang; dan ketiga, surau gadang (besar) yang dapat menampung hingga 1000 orang. Surau yang besar ini biasanya dikelola oleh tokoh agama atau Tuanku yang terkenal, sehingga menarik ratusan bahkan ribuan murid.

Syaikh Burhanuddin, pendiri surau pertama di Ulakan, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Tanah Minang pada abad ke-17. Di sini, ia memberikan pengajaran Islam dan mendidik para santrinya, beberapa di antaranya menjadi ulama yang berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ajaran Islam di Minangkabau. Karakteristik pendidikan di surau mirip dengan lembaga meunasah di Aceh dan pesantren di Pulau Jawa.

Surau berkembang pesat antara akhir abad ke-17 hingga akhir abad ke-19, menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam serta tasawuf. Pada tahun 1840-an, Abdurrahman mendirikan surau di Batuhampar, yang kemudian berkembang pesat karena menerapkan sistem pembelajaran madrasah dengan pendekatan persuasif, yang menarik minat masyarakat sekitar untuk belajar di sana.

2. Dayah/Meunasah

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Aceh dan juga di Nusantara. Dayah berkembang seiring dengan proses masuknya dan berkembangnya Islam di masyarakat

Aceh. Istilah "dayah" hanya digunakan di Aceh, sedangkan di daerah lain disebut pesantren (di Jawa) atau surau (di Sumatera Barat). Lembaga dayah, yang berasal dari masa sebelum kedatangan Belanda, dirancang khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Istilah "dayah" sendiri berasal dari bahasa Arab "zawiyah" yang berarti "sudut", karena dalam tradisi Islam, pengajaran sering dilakukan di sudut-sudut masjid. Dalam bahasa Aceh, karena tidak adanya bunyi 'Z', istilah "zawiyah" berubah menjadi "dayah".

Selain istilah "dayah", ada juga istilah "meunasah" dalam konteks pendidikan tradisional di Aceh. Namun, dalam tulisan ini, istilah "dayah" digunakan secara luas untuk merujuk pada semua lembaga pendidikan tradisional di Aceh, termasuk "meunasah", tetapi tidak termasuk madrasah yang muncul belakangan setelah pembaharuan pendidikan Islam.

Pada awal sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam, istilah "zawiyah" digunakan untuk lembaga pendidikan yang kemudian berkembang menjadi madrasah. George Makdisi mengungkapkan bahwa madrasah berkembang dari pengajian yang dikenal dengan berbagai istilah seperti Ribath, Khanqah, Zawiyah, dan Turbah. Meskipun ada beberapa istilah ini, tidak jelas mengapa "zawiyah" menjadi istilah yang lebih umum digunakan di Aceh. Namun, dapat dipastikan bahwa istilah tersebut diperkenalkan ke Aceh oleh para ulama yang belajar di Mekkah, Kairo, atau Damaskus di zawiyah-zawiyah yang mengajarkan fiqh mazhab Syafi'i. Fakta bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling dominan di Aceh dan Asia Tenggara mendukung teori ini.

Struktur pendidikan dayah memiliki beberapa ciri utama. Salah satu ciri menonjol adalah pemondokan bagi santri atau murid di dalam kompleks yang sama dengan guru. Karena adanya pemondokan ini, dayah sering disebut juga dengan pondok atau pondok pesantren. Sistem pemondokan ini penting dalam membentuk kepribadian para santri, menciptakan komunitas yang terintegrasi di mana pendidikan berlangsung secara alami. Ciri lain dari pendidikan dayah adalah pengajaran yang sangat berfokus pada ilmu-ilmu agama dalam pengertian tradisional.

Menurut Safwan Idris, dayah berkontribusi besar terhadap kemajuan Aceh. Melalui pendidikan dayah, nilai-nilai lokal dan keislaman diturunkan dari generasi ke generasi. Sebelum Belanda datang, dayah menjadi pusat pengembangan dan pembinaan masyarakat. Setelah Belanda menguasai Nusantara, dayah tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga garda terdepan dalam melawan penjajahan Belanda.

3. Pesantren

Pesantren adalah salah satu institusi pendidikan Islam tradisional yang terkenal di Jawa dan Sunda, sementara di daerah Minangkabau dikenal dengan sebutan Surau, dan di Aceh disebut Dayah, Rangkang, atau Meunasah. Istilah pesantren berasal dari kata "santri", yang diberi awalan "pe" dan akhiran "an", menjadi "pesantrian", yang berarti tempat tinggal para santri. Namun, asal-usul kata "santri" masih diperdebatkan. Menurut Profesor Johns, kata ini mungkin berasal dari bahasa Tamil yang berarti "guru mengaji". Ada juga yang menyatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa India yang berarti "orang yang tahu kitab-kitab suci Hindu". Pendapat lain menyebutkan bahwa kata "santri" berasal dari bahasa Sansekerta "shastri", yang artinya kitab suci atau ilmu pengetahuan.

Meski demikian, Harun Nasution berpendapat bahwa sistem pendidikan pesantren berasal dari tradisi Islam, khususnya dari kaum sufi atau tarekat. Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa penyebaran Islam di Indonesia awalnya terkait dengan aktivitas tarekat. Ada juga teori yang menyatakan bahwa pesantren berasal dari lembaga pendidikan yang dilaksanakan di masjid-masjid Khan di Mesir. Seiring dengan perkembangan Islam, sistem ini kemudian diadopsi oleh masyarakat Muslim di Jawa.

Perkembangan dan pertumbuhan pesantren di Jawa sangat erat hubungannya dengan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Maulana Malik Ibrahim, atau Syekh Maulana Maghribi, dipandang sebagai sosok penting yang pertama kali membawa Islam ke Jawa dan memulai pendirian pesantren. Namun, tokoh Wali Songo yang dikenal berhasil dalam mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Sunan Ampel, juga dikenal sebagai Raden Rahmat. Pesantren pertama didirikan di Kembang Kuning, kemudian dipindahkan ke wilayah Ampel Denta di Surabaya. Selanjutnya, pesantren-pesantren baru muncul seperti pesantren Giri yang didirikan Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.

Pada masa kerajaan Mataram, pesantren mulai berkembang pesat dan fungsinya mirip dengan pendidikan formal. Setiap anak Muslim di wilayah Mataram diharuskan mengaji Al-Qur'an di surau-surau untuk pendidikan dasar, dan di pesantren untuk tingkat lanjutan. Selain itu, pesantren juga mendukung kegiatan Islamisasi dan menggabungkan tiga unsur pendidikan, yaitu ibadah, tabligh (penyebaran ilmu), dan amal (kegiatan sosial).

Faktor Sosial Dan Politik Yang Mempengaruhi Lahirnya Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara

Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia sudah memiliki tradisi pendidikan yang kuat, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Faktor-faktor sosial-politik yang melatarbelakangi kelahiran lembaga pendidikan Islam di era tersebut sangat kompleks dan berkaitan dengan dinamika masyarakat serta perkembangan agama Islam di Nusantara (Yanti 2019).

Dalam konteks sosial, penyebaran Islam di Indonesia dimulai sejak abad ke-7 hingga abad ke-16, melalui jalur perdagangan yang membawa para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan Asia Selatan ke Nusantara (Fadhly 2018). Perkembangan ini mendorong terbentuknya komunitas-komunitas Muslim yang kemudian memerlukan lembaga pendidikan untuk mengajarkan prinsip-prinsip agama dan membangun pemahaman yang kuat tentang Islam. Para ulama dan pedagang Muslim ini mendirikan masjid dan surau yang kemudian menjadi pusat pendidikan awal, di mana masyarakat bisa belajar Al-Qur'an, hukum Islam, dan bahasa Arab.

Seiring dengan penyebaran Islam, terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Islamisasi mendorong munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang beralih ke agama Islam dan mempengaruhi masyarakat di sekitar mereka untuk mengikutinya. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pendidikan Islam, tidak hanya sebagai bentuk pengetahuan spiritual, tetapi juga sebagai cara untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut (Daud 2021).

Selain itu, lembaga pendidikan Islam pada periode ini juga dipengaruhi oleh faktor politik (Mujib and Yunita 2018). Pada saat itu, Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan yang saling berinteraksi dan bersaing. Para penguasa Muslim melihat pendidikan Islam sebagai cara untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menciptakan stabilitas politik. Dengan adanya lembaga pendidikan Islam, para penguasa dapat memperkuat pengaruh mereka dan membentuk kelompok intelektual yang mendukung kepemimpinan mereka.

Peran lembaga pendidikan Islam dalam menjaga identitas budaya juga tidak dapat diabaikan. Ketika Islam mulai menyebar, ia berdialog dengan budaya lokal yang telah ada. Lembaga pendidikan Islam berperan dalam memadukan ajaran Islam dengan tradisi setempat, sehingga Islam bisa diterima oleh masyarakat secara luas (Saad 2015). Hal ini

melahirkan apa yang sering disebut sebagai "Islam Nusantara," di mana Islam menyatu dengan budaya lokal dan mengembangkan karakteristik unik yang berbeda dari Islam di Timur Tengah.

Di sisi lain, perubahan sosial dan politik di Nusantara juga berdampak pada struktur pendidikan Islam itu sendiri. Beberapa kerajaan dan kesultanan mendirikan lembaga pendidikan formal yang lebih terstruktur, seperti pesantren, untuk mendidik generasi muda dan mempersiapkan mereka sebagai pemimpin masyarakat di masa depan. Pesantren menjadi institusi yang memiliki peran penting dalam membentuk ulama dan pemimpin lokal, serta menjadi pusat pengetahuan yang dihormati.

Pada akhirnya, kelahiran lembaga pendidikan Islam sebelum penjajahan Belanda mencerminkan perpaduan antara kebutuhan sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang di Nusantara. Melalui lembaga-lembaga ini, masyarakat Islam Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat bagi pengembangan agama dan budaya, sekaligus menciptakan landasan bagi pendidikan Islam yang tetap relevan hingga saat ini

KESIMPULAN

Lembaga pendidikan Islam di Nusantara sebelum penjajahan Belanda muncul sebagai hasil dari perpaduan kebutuhan sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Berawal dari penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan Asia Selatan membentuk komunitas Muslim yang membutuhkan lembaga pendidikan untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Lembaga seperti surau, meunasah, dayah, dan pesantren menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam, yang juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan belajar ilmu agama. Faktor politik turut memengaruhi perkembangan ini, karena para penguasa Muslim melihat pendidikan Islam sebagai cara untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menciptakan stabilitas politik. Lembaga pendidikan ini juga memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya dengan memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal, menghasilkan karakteristik unik yang dikenal sebagai "Islam Nusantara." Perkembangan sosial dan politik di Nusantara mendorong beberapa kerajaan dan kesultanan mendirikan lembaga pendidikan yang lebih terstruktur, seperti pesantren, untuk mendidik generasi muda dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan. Pada akhirnya, kelahiran lembaga pendidikan Islam sebelum

penjajahan Belanda menunjukkan adaptasi dan respons masyarakat terhadap dinamika sosial dan politik, menciptakan landasan yang kuat bagi perkembangan Islam di Nusantara hingga saat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Yusri M. 2021. "DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (Suatu Kajian Historis)." *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 10 (2). <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.1>.
- Fadhly, Fabian. 2018. "Pemahaman Keagamaan Islam Di Asia Tenggara Abad XIII-XX." *Millah: Journal of Religious Studies* 18 (1): 51–78. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art4>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. 2021. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9 (1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.
- Mujib, Abdul, and Yuyun Yunita. 2018. "PENDIDIKAN ISLAM DAN POLITIK." *RIAYAH* 3 (1).
- Muslim. 2021. "PERTUMBUHAN INSITITUSI PENDIDIKAN AWAL DI INDONESIA :PESANTREN, SURAU DAN DAYAH." *Bil Qolam Penidikan Islam* 13: 19–37.
- Nurlisma. 2023. "Perkembangan Agama Islam Di Nusantara." *Azkia: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 18 (1): 45–56. <http://journal.stitalhilalsigli.ac.id/index.php/azkia>.
- Saad, M. Abu. 2015. "Pendidikan Islam Dan Peranannya Dalam Membangun Dan Mengembangkan Kearifan Sosial." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 1 (6): 1–11. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v12i2.409>.
- Safei. 2015. "Peranan Kerajaan Islam Dalam Perkembangan Pendidikan Di Indonesia." *Auladuna* 2 (2): 301–8.
- Surawardi. 2021. "Pendidikan Pemahaman Islam Nusantara." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 21 (1): 1–15. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/146/157>.
- Susmihara. 2017. "Susmihara Walisongo Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Rihlah* 5 (2): 151–69.

Tabrani, A., Etc. 2019. *PERKEMBANGAN ISLAM DI NUSANTARA DAN ASIA TENGGARA*. DKI Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian.

Yanti, Novia. 2019. “SEJARAH DAN DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA (SURAU, PESANTREN DAN MADRASAH)” IX (1): 135–64.